



Center of Language and Cultural Studies

CENDEKIA

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran

<https://cendekia.soloclcs.org/index.php/cendekia>

ISSN : 1978-2098

EISSN: 2407-8557

Month, Vol, No	: April, Vol.18 No.01
DOI	: doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887
Received	: April, 2024
Accepted	: April, 2024
Published	: April, 2024

Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan

Miar^{1*}, Wiwin Zakiah², Jonathan Giovanni³, Silvia Cerisma T⁴

Universitas Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: Miar@feb.upr.ac.id

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah berdampak kepada perbedaan pelaksanaan dan hasil pembangunan dari setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan mengembangkan strategi daerahnya sendiri untuk perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kebijakan pembangunan masing-masing kabupaten/kota akan berbeda, terutama kebijakan dalam bidang pembangunan ekonomi (desentralisasi fiskal, investasi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah) tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, salah satu provinsi di Indonesia. Melalui data time series, cross section data panel diperoleh 70 populasi. Data dianalisis dengan Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, belanja modal, kinerja keuangan daerah, berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun koefisiennya positif. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negative. investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negative. Belanja modal berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien positif. Kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negative. Pengaruh Tidak langsung: Desentralisasi fiskal, investasi, belanja modal dan kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negative.

Kata Kunci: *Desentralisasi Fiskal, Investasi, Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Citation (APA): Miar,dkk (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Provinsi Tengah Kalimantan: Perspektif pendidikan *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 18(1), 72-88. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887>.

1. PENDAHULUAN

Masalah utama pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan pada kebijakan pembangunan berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah (*internal development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan fisik yang ada di daerah tersebut. Dengan adanya ciri khas ataupun perbedaan dari masing-masing daerah tersebut, maka mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut guna meningkatkan pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan perekonomian suatu pada daerah (Ahmad, 2008).

Pembangunan daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan menurut asas otonomi dan pengelolaan sumber daya, memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini bertujuan untuk lebih memajukan sistem pelayanan kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kesuksesan pembangunan ekonomi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Hal ini dapat menegaskan bahwa besaran keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari belanja publik dalam alokasi anggaran sektoral yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut *World Bank* (2006) untuk mempercepat pertumbuhan kabupaten/kota perlu ditekankan upaya peningkatan pelayanan publik seperti tata pemerintahan yang baik, yang akan mendorong pengelolaan keuangan dan penyediaan layanan yang berkualitas. Kemajuan ini akan menarik investor, yang akan mempercepat pembangunan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kualitas hidup semua masyarakat miskin, pembangunan ekonomi lokal akan memperkuat ekonomi daerah dan membantu mengurangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja baru dan posisi fiskal yang lebih kuat sehingga meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan kemajuan pada siklus pengembangan.

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi adalah pengembangan kegiatan dan layanan yang mengarah pada masyarakat dan kemakmuran masyarakat akan meningkat. Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2022 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global sebagai akibat pandemi Covid-19. Khususnya kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan segera bergairah dengan didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi, dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi dan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi *covid-19*.

Setiap wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tentunya memiliki upaya ataupun strategi yang berbeda-beda antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerahnya, baik dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan keuangan daerahnya, perkembangan iklim investasi dan lain sebagainya. Namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan adalah masalah yang sangat rumit dan sulit untuk dituntaskan. Oleh karena itu, tidak hanya membutuhkan perencanaan pengembangan yang cermat dan hanya bertumpu pada belanja modal, tetapi pemerintah juga harus mencoba merumuskan rencana atau terobosan untuk mengurangi angka kemiskinan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban dalam pengembangan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Menurut Hartomo (2017)

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi pendapatan, kepemilikan aset produksi dan harta benda, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan sekelompok orang ataupun individu menjadi miskin, dan keterbatasan akses kaum miskin pada keseluruhan proses kebijakan publik yang mempunyai pengaruh kepada kehidupan mereka.

Penyebab terjadinya kemiskinan juga terjadi akibat ketidaksetaraan model kepemilikan sumber daya yang menyebabkan munculnya kesenjangan pendapatan, dan masyarakat miskin hanya memiliki sumber daya berkualitas rendah. Selanjutnya, perbedaan sumber daya manusia dan kualitas rendah juga merupakan alasan dari munculnya kemiskinan, dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah maka akan menciptakan produktifitas yang rendah pula, adanya perbedaan akses modal maka akan menyebabkan terjadinya kemiskinan (Kuncoro, 2000).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) kemiskinan adalah ketidakmampuan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum kehidupan sedang (makanan dan non- makanan). Biro Pusat Statistik (BPS) juga menetapkan bahwa Garis kemiskinan adalah pengeluaran yang dibutuhkan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan makanan 2.100 kalori per orang per hari, serta kebutuhan non-makanan antara lain tempat tinggal yang layak, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan berbagai kebutuhan barang dan jasa lainnya. Menurut Arsyad (2000) kemiskinan terjadi karena beberapa faktor berikut ini seperti pengetahuan yang terbatas, minimnya alokasi sumber daya, tingkat kemajuan teknologi yang terlalu cepat, dan situasi ekonomi yang berfluktuatif.

Kebijakan otonomi daerah berdampak kepada perbedaan pelaksanaan dan hasil pembangunan dari setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota akan mengembangkan strategi daerahnya sendiri untuk perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Kebijakan pembangunan masing-masing kabupaten/kota akan berbeda, terutama kebijakan dalam bidang pembangunan ekonomi (desentralisasi fiskal, investasi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah) tetapi pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (1994) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk penyediaan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Peningkatan kapasitas tergantung pada perbaikan atau penyesuaian sistem dan teknologi ideologi dengan kebutuhan situasi yang ada.

Menurut Sukirno (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan pengembangan kegiatan produksi barang dan jasa dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, yang berarti bahwa jika ada pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut akan meningkatkan kemakmuran masyarakat karena barang dan jasa yang tersedia dapat dengan mudah mengembalikan kebutuhan.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan adalah perubahan kondisi ekonomi negara-negara berkembang yang dijelaskan oleh teori pertumbuhan, yang menyatakan bahwa perubahan tersebut saling menguntungkan untuk membenahi kondisi ekonomi negara-negara tersebut. Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan *output* per kapita dalam jangka panjang dan bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi untuk membentuk proses pertumbuhan, maka harus dijelaskan bagaimana pertumbuhan terjadi dalam hubungan timbal balik antara kedua faktor

ekonomi tersebut adalah teori pertumbuhan ekonomi. Banyak ahli telah mengemukakan teori ini untuk membenahi situasi ekonomi suatu negara (Amalia, Fitri., dkk. 2022).

2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Ketika menganalisis pertumbuhan ekonomi, teori Harold-Domar bertujuan untuk menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perekonomian untuk mencapai pertumbuhan (steady growth) yang stabil dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan asumsi-asumsi berikut: (i) barang modal dalam kapasitas penuh (ii) tabungan sebanding dengan pendapatan nasional (iii) nilai rasio modal-produksi (capital-output ratio) tetap dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor (Sukirno, 2014).

2.4. Faktor-Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, kuantitas dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya wirausahawan yang gigih, serta kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern merupakan beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Uraian pada bagian ini menjelaskan beberapa faktor yang telah lama dianggap oleh para ekonom sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014).

2.5. Kemiskinan

Menurut World Bank (2006) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memanfaatkan segala macam pilihan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kesehatan, standar hidup yang layak, kebebasan, harga diri dan rasa hidup dihormati seperti orang lain.

Menurut Kuncoro (2017) menyatakan kemiskinan didasarkan pada teori lingkaran setan kemiskinan, dengan ketidaksempurnaan pasar, kekurangan modal sumber daya manusia yang kurang berkembang menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah, pendapatan yang rendah menyebabkan investasi dan tabungan yang rendah. Jika pendapatan terus menurun, maka kemiskinan akan terjadi karena modal untuk menopang kehidupan tidak optimal.

2.6. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta. Pengeluaran pembangunan juga menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi pada proyek-proyek yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kekayaan, dan program-program yang secara langsung berdampak pada daerah yang tertinggal. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah ketika pemerintah membuat kebijakan untuk pembelian barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan. Teori pengeluaran pemerintah didasarkan pada pendekatan teori makro (Basri dan Subri, 2003).

2.7. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal negara, yaitu untuk mencapai ketahanan fiskal yang *berkesinambungan* (fiscal sustainability) dan memberikan rangsangan terhadap kegiatan perekonomian masyarakat, kebijakan

desentralisasi fiskal diharapkan mampu mewujudkan pemerataan keuangan setiap daerah yang setara dengan besarnya kewenangan urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah otonom (Farida, 2011).

2.8. Investasi

Menurut Mankiw (2014) investasi mengacu pada pembelian barang yang akan digunakan untuk meningkatkan barang dan jasa di masa depan. Investasi adalah jumlah pembelian barang modal, inventaris, dan bangunan atau struktur. Investasi adalah penggunaan sumber daya keuangan atau lainnya untuk memiliki aset di masa sekarang dengan tujuan menghasilkan keuntungan di masa depan. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kekayaan finansial, dengan titik awalnya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dari aset yang dimiliki saat ini di masa depan (Ernawati, 2021).

Menurut Fahmi (2018) negara memiliki beberapa tujuan investasi untuk keputusan investasi tersebut, yaitu: (1) terciptanya investasi yang berkelanjutan (*continue*) (2) tercapainya keuntungan sebesar-besarnya atau keuntungan yang diharapkan (keuntungan aktual) (3) terciptanya kemakmuran ekonomi bagi masyarakat dan memajukan pembangunan bangsa.

2.9. Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam konsep anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah meliputi: (1) pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, dan bertanggung jawab (2) seluruh pendapatan daerah dan pengeluaran daerah harus tercatat dalam APBD, baik perubahan maupun perhitungan APBD (3) daerah dapat membangun anggaran cadangan (4) selain sumber pendanaan yang ditentukan, daerah juga dapat mencari sumber pendanaan lain, misalnya kerja sama dengan badan lain (5) pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan daerah melalui APBD berbasis kinerja (Suwandi, 2015).

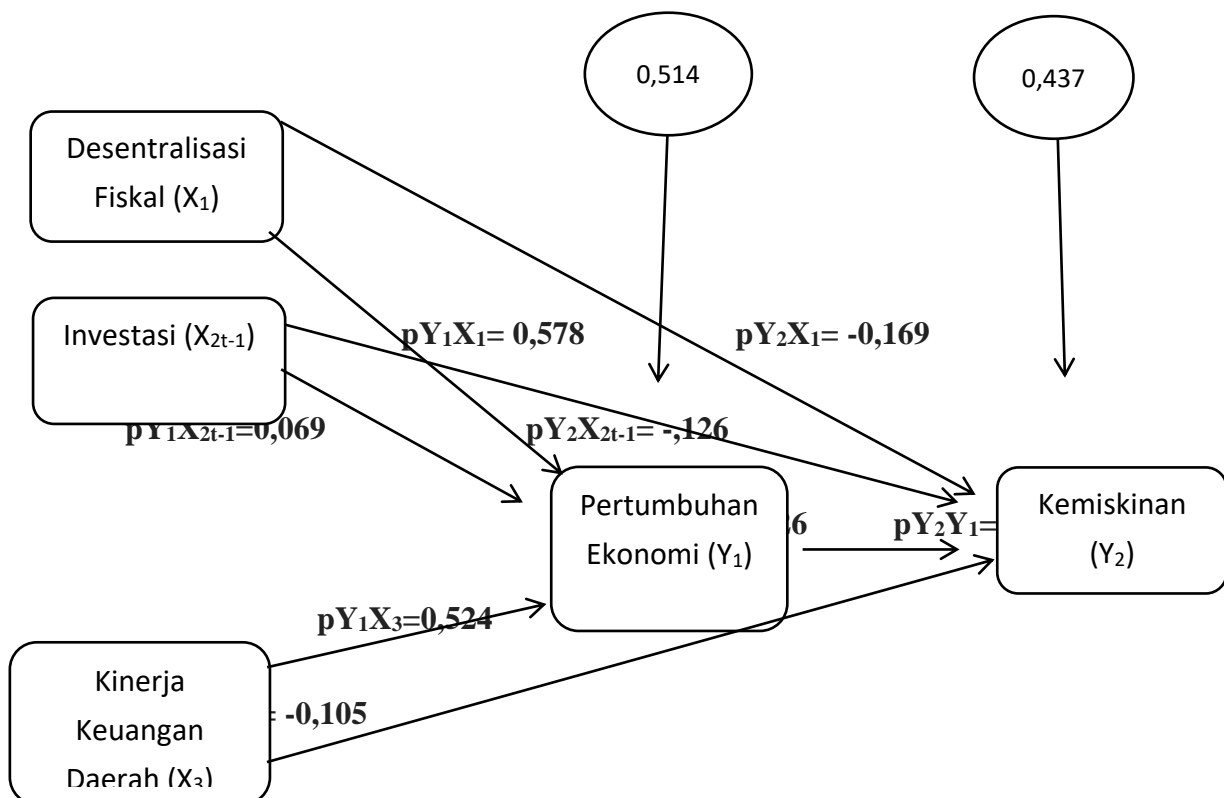
3. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yang diambil dari data publikasi berupa buku-buku atau literatur, artikel ilmiah maupun dari hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) mulai tahun 2018 sampai dengan 2022. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk: Menganalisis pengaruh langsung desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien positif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi desentralisasi fiskal maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah efektif dalam mengalokasikan dana dari pemerintah pusat ke daerah dalam hal pelayanan publik ke masyarakat. Sehingga pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Desentralisasi fiskal akan berdampak kepada aktivitas perekonomian masyarakat dikarenakan pemerintah daerah memiliki hubungan erat dengan masyarakat dan memiliki keunggulan informasi, sehingga dapat memberikan layanan publik yang benar-benar dibutuhkan di daerah tersebut. Desentralisasi fiskal juga bertujuan sebagai peningkatan akumulasi modal yang ada di daerah melalui pemanfaatan dan perencanaan anggaran dan memberikan kekuatan luas di wilayah tersebut. Dengan terlaksananya otonomi dan desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah tentunya dapat lebih meratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing, sehingga melalui pembangunan-pembangunan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 4.2 Analisis Jalur Penelitian

4.2 Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menjelaskan bahwa investasi berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien positif, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi investasi belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi melalui penanaman modal asing (PMA) tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan masuknya penanaman modal asing (PMA) belum menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Penanaman modal asing (PMA) belum memberikan manfaat untuk aktivitas perekonomian masyarakat, golongan penanaman modal, daerah dan sosial. Penanaman modal asing (PMA) belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah hal ini dikarenakan penanaman modal asing (PMA) di dominasi oleh sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; industri makanan; serta pertambangan tidak menggunakan tenaga kerja lokal, sehingga tidak berdampak kepada peningkatan pendapatan masyarakat setempat dan tentunya tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Alasan lainnya yaitu kurangnya tenaga kerja yang terampil, dan juga teknologi sehingga para investor masih enggan untuk menanamkan modalnya di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah juga masih terhambat oleh pengurusan perizinan akibat birokrasi yang berbelit-belit serta kurangnya kepatuhan antar departemen yang terkait. Serta rendahnya kualitas daya saing sumber daya manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sehingga alih teknologi belum terlaksana dengan baik.

4.3 Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien positif sehingga dapat dikatakan semakin tinggi kinerja keuangan daerah maka akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun kinerja keuangan daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong sangat rendah atau belum sepenuhnya mandiri dalam mengatur dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahannya, namun melalui kemandirian keuangan daerah tersebut sudah memberikan dampak pada pendapatan asli daerah (PAD). Dengan peningkatan PAD ini tentunya akan memberikan perkembangan yang pesat karena daerah akan lebih maju dan berkembang dalam aktivitas perekonomiannya, sehingga akan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Meskipun pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang tanggap dalam pengelolaan anggaran yang ada dan belum dapat mengelola daerahnya sendiri secara optimal, namun apabila pemerintah

daerah dan pemerintah pusat secara bersama-sama menjalankan tugas dan mengaplikasikan kebijakan yang sesuai dengan asas otonomi daerah, maka APBD yang seharusnya akan tepat dan kinerja keuangan daerah melalui kemandirian keuangan daerah dapat meningkatkan PAD diberbagai daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sehingga akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena pendapatan asli daerah (PAD) menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan.

4.4 Pengaruh Langsung Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan melalui desentralisasi fiskal dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, dan sebaliknya rendahnya pendapatan perkapita akan menambah jumlah penduduk miskin. Dengan berkurangnya kemiskinan juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pendapatandari masyarakat dapat membayar pajak atau konsumsi masyarakat yang berdampak pada pajak atau retribusi daerah sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Tingginya derajat desentralisasi fiskal dalam suatu daerah, maka menandakan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut semakin mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Meskipun angka derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong rendah, namun dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengalokasikan sebagian dari pendapatan daerahnya untuk mengurangi penduduk miskin dengan upaya membiayai program-program pengentasan kemiskinan. Adapun yang menjadi program kemiskinan yaitu seperti program keluarga harapan (PHK), program beras untuk keluarga miskin (RASKIN), program jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), program bantuan operasional sekolah (BOS) dan masih banyak program lainnya. Dalam hal ini Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sudah termasuk efektif dalam mengelola hasil kekayaan daerah sehingga mengatasi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota bisa untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan cara pembiayaan program pengentasan kemiskinan tersebut.

4.5 Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menjelaskan bahwa investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi

investasi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sesuai dengan teori investasi pengganda (*multiple effect*) yang dikemukakan oleh Keynes percaya bahwa peningkatan investasi menyebabkan peningkatan pendapatan, dan dengan peningkatan pendapatan, permintaan barang konsumsi meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan pendapatan dan lapangan kerja. Ketika pendapatan meningkat dan orang mendapatkan lebih banyak pekerjaan, jumlah orang miskin akan berkurang.

Penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mendominasi dalam sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan ; pertambangan kemudian disusul oleh industri makanan; industri kimia dan farmasi; jasa lainnya; listrik, gas dan air; perdagangan dan reparasi; perumahan kawasan industri dan perkantoran; serta transportasi, gudang dan telekomunikasi. Melalui investasi asing tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan suatu daerah tersebut mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang bernilai tinggi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dalam daerah tersebut.

4.6 Pengaruh Langsung Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi kinerja keuangan daerah maka akan menurunkan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah tidak signifikan terhadap kemiskinan jadi kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah belum memberikan kontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan daerahnya atau belum mampu secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mampu menggali potensi-potensi sumber ekonomi ataupun potensi-potensi keuangan daerahnya sehingga masih adanya kesenjangan pendapatan yang tinggi di dalam masyarakat meskipun pendapatan daerah yang semakin meningkat tersebut belum mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan dari seberapa mampu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, namun peranannya masih belum mampu dalam menurunkan angka kemiskinan. Kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan dengan baik di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, mengingat bahwa adanya dampak dari pandemi *covid-19* di Indonesia khususnya di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sehingga anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan

daerah yang diselenggarakan pemerintah dalam hal semangat otonomi daerah seperti *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor* yang merupakan tujuan ataupun program untuk pemberantasan kemiskinan dalam suatu wilayah tersebut dialih fungsikan ataupun lebih diutamakan untuk kegiatan pemberantasan *covid-19* tersebut sehingga kinerja keuangan daerah kurang optimal dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

4.7 Langsung Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negatif, yang berarti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan teori *trickle down effect* yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berakibat positif buat penurunan kemiskinan, jika pertumbuhan ekonomi yang berlangsung membela penduduk miskin.

Pengaruh Tidak Langsung

4.8 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian ini desentralisasi fiskal secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negatif. Menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal belum mampu menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan kurang optimalnya pemerintah daerah dalam mengelola desentralisasi fiskal di daerahnya. Dalam artian besarnya derajat desentralisasi fiskal daerah belum mampu dimanfaatkan untuk penyediaan layanan publik yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan tidak dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

4.9 Pengaruh Tidak Langsung Investasi Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian ini investasi secara tidak langsung berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negatif. Hal ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing (PMA) dapat mengurangi tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan PMA dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi asing merupakan salah satu dari dimensi kesejahteraan, investasi secara langsung dapat mempengaruhi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat apabila keuntungan yang diperoleh dari hasil penanaman modal asing (PMA) terdistribusi secara merata ke masyarakat. Keberadaan investor asing di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai manfaat yang luas (*multiplier effect*) manfaat yang dimaksud antara lain (1) melalui kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah (2) dapat menciptakan permintaan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku (3) menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor (4) dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak (seperti pajak kendaraan yang mereka gunakan) (5) adanya alih teknologi maupun alih ilmu pengetahuan (*transfer of technology and knowledge*).

Adanya perusahaan asing di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari segi masalah gaji, terserapnya tenaga kerja yang luas bagi masyarakat dikawasan penanaman modal tersebut, memberikan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kerja lokal, mendorong berkembangnya industri barang-barang dan dapat membangun daerah-daerah yang tertinggal di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga melalui manfaat tersebut maka akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut.

4.10 Pengaruh Tidak Langsung Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Pada penelitian ini kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah melalui kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan meskipun pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah meningkat, namun belum memberikan dampak kepada pengurangan kemiskinan dikarenakan adanya belanja rutin daerah yang bisa saja cukup besar menyedot pendapatan daerah, sehingga menimbulkan sedikitnya penyaluran dana untuk daerah-daerah yang masih kekurangan bantuan dari pemerintah. Keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Ketika pemerintah gagal mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi, pengentasan kemiskinan terhambat oleh kurangnya kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan, dan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap faktor-faktor produksi. Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga tidak berdampak karena biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada manfaatnya dalam menghasilkan pendapatan asli daerah yang salah satunya tercermin pada belanja pegawai.

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi (Halim 2007). Bila PAD yang diperoleh oleh daerah tinggi maka persentase PAD dalam membiayai pelayanan pembangunan juga tinggi, begitu pula sebaliknya. Mengingat bahwa pajak daerah merupakan sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sehingga minimnya kesadaran masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah dalam membayar kewajibannya juga merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Sehingga pendapatan asli daerah (PAD) belum berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel desentralisasi fiskal, investasi, belanja modal, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan melakukan berbagai macam analisis pengujian statistik, maka diperoleh kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Investasi berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Kinerja keuangan daerah berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Investasi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kinerja keuangan daerah secara langsung tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Desentralisasi fiskal secara tidak langsung tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Investasi secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Kinerja keuangan daerah secara tidak langsung tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ai, Siti Farida. (2011). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti. (2008). *Pertumbuhan Ekonomi: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 9 No. 1.
- Amalia, Fitri., dkk. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Ardhani, Pungky. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKP.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2022). *Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah*
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2022). *Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2018 – 2022.*
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kemiskinan dan Ketimpangan.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Selatan Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Utara Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sukamara Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamandau Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Seruyan Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Katingan Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulang Pisau. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pulang Pisau Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gunung Mas Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Timur. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Barito Timur Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Murung Raya Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Palangka Raya. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Palangka Raya Menurut Pengeluaran 2018-2022.*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.*

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaPangka Raya. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022*.
- Basri, Y, Z. & Mulyadi Subri. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Berita Kalteng. (2023). "Maret 2022, Angka Kemiskinan Di Kalteng Mencapai 5,28 Persen", diakses pada 13 Mei 2023 dari <https://beritakalteng.com/>.
- Biro Adpim. (2023). "Pemprov kalteng bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota tangani masalah kemiskinan akibat dampak covid-19", diakses pada 13 Mei 2023 dari <https://biroadpim.kalteng.go.id/>.
- Darise, Nurlan. (2008). *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri*. Jakarta: Kembangan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah. (2022). *Data Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021*
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan, diakses pada 02 Mei 2022 dari <https://djpk.kemenku.go.id>

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017-2022*, diakses pada 02 Mei 2022 dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
- Dinarjito A. & Dharmazi A. (2020). “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur*” , 2(1), hlm. 57-72.
- Ernawati, Tia. (2021). *Manajemen Pembangunan Wilayah: Strategi dan Inovasi*. Cirebon: Insania.
- Fadillah, A. A. R. (2017). *Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di LQ45*. Jurnal Akuntansi, 12(1).
- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabet.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Hamzah, M. (2020). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 – 2017*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Veteran Negeri.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke-1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ke-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke-3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartomo dan Aziz. (2017). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Houghton. (2020). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan Handbook on Poverty and Inequality*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutabarat, D.D., dkk. (2016). *Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Jakarta: Direktorat Sistem Perbendaharaan Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- Igamo, A., & Aulia Falianty, T. (2015). *SRIWIJAYA INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMIC ECONOMICS AND BUSINESS The Impact of Electronic Money on The Efficiency of The Payment System And The Substitution of Cash In Indonesia*. Sijdeb, 2(3), 237–254.
- Irawan Pirda. (2018). *Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Serta Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesempatan Kerja Di Provinsi Kalimantan Timur*. Skripsi. Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.
- Ira Puspitasari (2021). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Malang.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Pengertian Belanja Modal, diakses pada 05 Mei 2022 di <https://www.kemenku.go.id>
- Khusaini, Mohammad. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Prees.
- Kuncoro, Mudrajat. (2000). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajat. (2017). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi ke-4*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N Gregory. (2014). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mangkoesebroto, Gurinto. (1997). *Ekonomi Publik Edisi ke-5*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miar. (2022). *Dilema Antara Tingginya Belanja Modal dan Masyarakat yang Sejahtera dalam Usaha Pemekaran Wilayah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muttaqien. (2016). *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis*. Jakarta: Khanata Pustaka LP3ES Indonesia
- Nugroho, F. (2012). *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurdin, Ismail. & Harati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- NSWI. (2022). "Investasi Per Kabupaten/Kota", diakses pada 5 Januari 2022 dari <https://nswi.bkpm.go.id/>.
- NSWI. (2023). "Investasi Per Kabupaten/Kota", diakses pada 13 Mei 2023 dari <https://nswi.bkpm.go.id/>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riduwan Akdon. (2007). *Rumusan Data Dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabrta.
- Rikah Mustika. (2022). *Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Tertinggi di Kalimantan*, diakses pada 05 Oktober 2022 dari <https://mmc.kalteng.go.id>
- Risuhedi. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sadono, Sukirno. (2000). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

- Sadono, Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Sadono, Sukirno.(2014). *MAKRO EKONOMI Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- Sandjojo. (2011). *Metode analysis Jalur (Path Analysis) dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Pusaka Sinar Harapan.
- Saputra dan Mahmudi. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia (JAAI)*, 16(2), 185-199.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Path Analysis Untuk Riset Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.
- Sefta Maheza (2022). *Analisis Desentralisasi Fiskal, Belanja Modal, dan pertumbuhan Ekonomi Terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Skripsi*. Palangka Raya : Universitas Palangka Raya.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., dan Sofiati, Ayu N. (2017). *KEUANGAN di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: ANDI.
- Suryawati. (2017). *Teori Ekonomi Mikro*. UPP, AMP YKPN. Yogyakarta: Jay.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya Terhadap pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Deepublish.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke-9*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. (1994). *Pembangunan Ekonomi di Dunia l Tiga*, Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daaerah.
- World Bank. (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.